

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh: Fransiskus X Lara Aba¹, Engelbertha E. Silalahi², Ni Luh Gde Lydia³,

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia,
Jalan Jakarta Jl. Raya pluit Raya 2, Jakarta, DKI Jakarta.

Email : fransiskus.lara@atmajaya.ac.id^{1,2,3}

ABSTRAK

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datang. Bertolak dari latar belakang, maka permasalahan yang perlu dicarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah kemampuan APBD membiayai pembangunan ekonomi DKI Jakarta? Struktur perekonomian DKI Jakarta memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDRB dari tahun 1992 – 2016. Adapun sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi dalam perekonomian berbeda-beda pada setiap periode di atas. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2017 – 2021, pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2017. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 49,07 trilyun pada tahun 2021. Demikian halnya belanja daerah, penurunan belanja daerah terjadi pada tahun 2017, dan selanjutnya mengalami peningkatan hingga mencapai 46,71 trilyun pada tahun 2021. Demikian halnya belanja daerah, hasil proyeksi

juga menunjukkan pada tahun 2017 belanja daerah mengalami penurunan menjadi 39,37 trilyun (18,07 %) dari pendapatan daerah tahun sebelumnya yang sebesar 48,06 trilyun. Angka belanja daerah selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 46,71 trilyun pada tahun 2021.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Anggaran pembangunan, pemerintahan daerah

ABSTRACT

Based on the above problems, this research develops leading sectors in the future. Starting from the background, then the issues that need to be searched for answers and discussed in this study as follows: How is the ability of the budget to finance the economic development of DKI Jakarta? The economic structure of DKI Jakarta contributes greatly to the formation of GRDP from 1992 to 2016. The economic sectors that contribute to the economy vary in each of the above periods. Based on the projection of regional spending and spending of DKI Jakarta in 2017 -

2021, local revenues decreased in 2017. However, in the following year increased every year to reach 49.07 trillion by 2021. Similarly, regional spending, decreased spending the area occurred in 2017, and subsequently increased to 46.71 trillion by 2021. Similarly, regional spending, projection results also show in 2017 regional spending decreased to 39.37 trillion (18.07%) of regional revenue the previous year amounted to 48.06 trillion. Regional expenditures subsequently increase every year to reach 46.71 trillion by 2021.

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan keuangan daerah harus dilaksanakan secara serasi dalam mendukung program pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan (Foremny, et al, 2014).

Beberapa penyebab yang membuat anggaran di DKI terhambat. Pertama, stabilitas organisasi (Pemprov DKI) belum kondusif untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan SKPD, cenderung sangat berhati-hati untuk melakukan terobosan untuk suatu program. Kedua, langkah pemerintah DKI Jakarta menggunakan e-budgeting sebagai sistem penganggaran juga masih belum matang. Hal ini membuat SKPD kesulitan menerapkannya. Ketiga, karena terlalu dipaksakan e-budgeting, akhirnya berekses pada terbukanya celah permainan dalam lelang yang dilakukan melalui e-budgeting.

Bertolak dari pemikiran di atas, kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang studi perbandingan implementasi penggunaan anggaran pembangunan ekonomi dalam kepemimpinan politik di DKI Jakarta

sebagai suatu analisis empiris yang memfokuskan pada evaluasi peranan ekonomi pada pendapatan serta posisi masing-masing pos untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyerapan anggaran bagi percepatan peningkatan di DKI Jakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi (Aba, Et all; 2015). Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program dan aktivitas (Adiab, Et all; 2007). Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan motor penggerak dan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran.

2.1. Konseptual Anggaran (*Budget*) dan Penganggaran (*Budgeting*)

Dalam membuat perencanaan anggaran digunakan pendekatan formal dan sistematis yang merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam kaitannya dengan perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Berdasarkan pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/ lembaga.

Berdasarkan Hunter Blair (2016), anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan dalam bentuk pengeluaran dan sumber pendapatannya selama satu tahun. Terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian (Albacete, N. and P. Lindner; 2013). Perencanaan

digunakan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang, sedangkan pengendalian lebih melihat kebelakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan (Kuhlmann; 1998).

Sedangkan menurut menurut Arie Halachmi (2012), anggaran adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran negara yang disusun setiap tahunnya. Oleh karena itu, APBD mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi salah satu alat utama untuk mensejahterakan masyarakat.

“Panganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran” (Miekatrien Sterck & Bram Scheers, 2006). Panganggaran (*Budgeting*) merupakan proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan. Dalam makna yang lebih luas, panganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran yang biasa dikenal dengan siklus anggaran (Armstrong, H.W. and J. Taylor; 2000).

2.2. Prinsip Dasar Penyerapan Anggaran

Tahapan siklus anggaran dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Secara khusus, untuk penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN.

“Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan” (Lu, Y., & Willoughby, K. G. (2012). Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta, belanja pemerintah, dan ekspor netto (Balasubramaniam ; 2006). Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar proporsi pemerintah dalam membentuk PDB dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari peningkatan jumlah PDB (Badan Pusat Statistik; 2017). Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja untuk barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional (Holt; 1957). Namun demikian, penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 90% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi tolak ukur

kinerja dari SKPD tersebut.

2.3. Mekanisme dan Sistem Penganggaran

Sistem penganggaran di Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Goyal Ashima (2010), APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berisi daftar sistematis dan rincian rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember) dan ditetapkan dengan Undang-Undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan. APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Besarnya penyerapan anggaran akan berdampak pada semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Rasio realisasi penyerapan belanja Kementerian atau Lembaga terhadap realisasi anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektivitas belanja negara. Selain itu, kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel.

3. METODE ANALISIS

Analisis Struktur dan Pertumbuhan APBD adalah Struktur APBD dianalisis dengan melihat kontribusi sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran relatif terhadap total APBD DKI Jakarta. Sedangkan pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran dalam APBD akan dihitung dengan menggunakan persamaan trend exponential (Conyers and Hills; 1990). *Analisis Kemampuan APBD adalah* Untuk melihat kinerja penerimaan

dan pengeluaran pemerintah daerah DKI Jakarta digunakan analisis: rasio penerimaan terhadap PDRB dan rasio penerimaan terhadap anggaran belanja pembangunan.

4. HASIL PEMBAHASAN

Penyusunan perencanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja ini lebih mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap usulan program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai kewajarannya dengan menggunakan standar analisa belanja, sehingga proses penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta dapat terserap dengan baik dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses kebijakan anggaran dalam kepemimpinan politik pada aspek standar analisa belanja dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja program atau kegiatan yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat didasarkan pada tolok ukur kinerja pelayanan dan standar biaya. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya keuangan.

Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan menggunakan instrumen PDRB. Instrumen tersebut memberikan indikasi peran sektor ekonomi regional yang potensial dan dominan dilihat dari penciptaan output dan nilai tambah maupun permintaan akhir. Rasio APBD terhadap PDRB adalah untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik melalui pengeluaran pemerintah dalam APBD.

Rasio pengeluaran terhadap kinerja PDRB Propinsi DKI Jakarta menunjukkan trend yang menurun pada tahun 1993 (2,9 persen), kemudian meningkat setiap tahunnya dari tahun 1994 (3,3 persen) sampai dengan tahun 1997 (4,3 persen) (tabel 1). Ini berarti, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik semakin membaik.

Proporsi pengeluaran dalam APBD adalah indikator untuk melihat efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan output yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Dengan kata lain, rasio APBD terhadap PDRB yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pengeluaran yang tepat telah dapat memacu pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta.

Rasio pengeluaran terhadap kinerja PDRB Propinsi DKI Jakarta menunjukkan trend yang menurun pada tahun 1998 (3,1 persen), kemudian meningkat pada tahun 1999 (6,0 persen), selanjutnya menurun setiap tahunnya dari tahun 2000 (5,2 persen) sampai dengan tahun 2002 (3,5 persen) (tabel 2). Ini berarti, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik belum membaik.

Proporsi pengeluaran dalam APBD adalah indikator untuk melihat efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan output yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Dengan kata lain, rasio APBD terhadap PDRB yang semakin menurun menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran belum dialokasikan secara tepat dalam rangka memacu pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta.

Rasio pengeluaran terhadap kinerja PDRB Propinsi DKI Jakarta menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2003 (3,9 persen) sampai dengan tahun 2007 (5,2 persen) (tabel 3). Ini berarti, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik

semakin membaik. Proporsi pengeluaran dalam APBD adalah indikator untuk melihat efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan output yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Dengan kata lain, rasio APBD terhadap PDRB yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pengeluaran yang tepat telah dapat memacu pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta.

Rasio pengeluaran terhadap kinerja PDRB Propinsi DKI Jakarta menunjukkan trend yang menurun pada tahun 2008 (4,5 persen), kemudian meningkat setiap tahunnya dari tahun 2009 (5,3 persen) sampai dengan tahun 2012 (7,0 persen) (tabel 4). Ini berarti, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik semakin membaik.

Proporsi pengeluaran dalam APBD adalah indikator untuk melihat efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan output yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Dengan kata lain, rasio APBD terhadap PDRB yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pengeluaran yang tepat telah dapat memacu pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta.

Rasio pengeluaran terhadap kinerja PDRB Propinsi DKI Jakarta menunjukkan trend yang meningkat pada tahun 2013 (8,0 persen), kemudian menurun pada tahun 2014 (7,5 persen), dan selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2015 (8,2 persen) sampai dengan tahun 2016 (8,9 persen) (tabel 5). Ini berarti, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik semakin membaik. Proporsi pengeluaran dalam APBD adalah indikator untuk melihat efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan output yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Dengan kata lain, rasio APBD terhadap PDRB yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pengeluaran

yang tepat telah dapat memacu pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta.

Untuk melihat gambaran perekonomian Propinsi DKI Jakarta ke depan dapat dilakukan dengan cara memproyeksikan besaran-besaran yang diperoleh dalam struktur PDRB. Hasil Proyeksi PDRB DKI Jakarta 5 tahun (2017 – 2021) proyeksi menunjukkan, PDRB DKI Jakarta meningkat dari 543,02 trilyun pada tahun 2016 menjadi 565,42 trilyun pada tahun 2017. Selanjutnya angka PDRB terus meningkat dan mencapai angka sebesar 659,32 trilyun pada tahun 2021.

Data juga menunjukkan hasil proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2017 – 2021. Data proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi 41,40 trilyun (12,91 persen) dari pendapatan daerah tahun sebelumnya yang sebesar 47,54 trilyun. Angka pendapatan daerah selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 49,07 trilyun pada tahun 2021.

Demikian halnya belanja daerah, hasil proyeksi juga menunjukkan pada tahun 2017 belanja daerah mengalami penurunan menjadi 39,37 trilyun (18,07 persen) dari pendapatan daerah tahun sebelumnya yang sebesar 48,06 trilyun. Angka belanja daerah selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 46,71 trilyun pada tahun 2021.

5. Diskusi

Studi perbandingan implementasi penggunaan anggaran pembangunan ekonomi dalam kepemimpinan politik dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan wilayah daerah dan potensi sektor-sektor ekonomi yang dimilikinya sebagai input penentuan dalam memperjelas gambaran perekonomian daerah secara objektif, yang dapat memberikan input yang diperlukan dalam penentuan kebijakan

pemerintah daerah, sehingga terbentuk sistem pembangunan ekonomi yang inovatif (Conyers and Hills, 1990)

DKI Jakarta terlalu mengandalkan biaya pembangunan kepada dana non APBD. Pemprov DKI Jakarta banyak mendanai pembangunan dengan dana Corporate Social Responsibility (CRS). Terobosan demikian bahkan kontradiktif dengan APBD yang telah disahkan karena membuatnya telantar dan tidak terserap maksimal. “Selama ini program yang dilakukan menggunakan dana non APBD seperti CSR, untuk diketahui, sampai saat ini memang ada beberapa infrastruktur di DKI Jakarta yang dibangun menggunakan dana CSR seperti Lenggang Jakarta, lokasi binaan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Monas. Selain itu, ada juga pengadaan truk sampah, Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), pengadaan bus tingkat city tour, penanganan waduk Pluit dan Ria Rio.

6. Kesimpulan

Hasil-hasil dari pembangunan dan pelaksanaan kebijakan tersebut pada akhirnya dapat di evaluasi dan dinilai keberhasilannya dengan ukuran-ukuran ekonomi dalam penggunaan anggaran yang telah dicapai sesuai perencanaan yang dapat dilihat melalui laporan pertanggung jawaban pemerintah, hasil data lembaga statistik, laporan masyarakat yang obyektif maupun laporan--laporan dari hasil penelitian ilmiah yang dilakukan masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang menunjukkan performance (kinerja) dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil kinerja tersebut terus digunakan sebagai input untuk evaluasi kebijakan selanjutnya dalam merevisi beberapa kekeliruan dalam kebijakan (policy failure) agar dapat disusun kembali menjadi pedoman perencanaan kebijakan dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Aba, F.X.L., Yussof, O.M., Saidatulakmal, B.M (2015), 'Analysis of Economic Structure in Poverty Eradication in the Province Of East Nusa Tenggara Indonesia', ELSEVIER, *Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 211*, 25 November 2015, Pages 81–88
- Adiab, A., Leigh, D., Mody, A., (2007). *International Finance and Income Convergence: Europe is Different*. IMF Working Paper.
- Albacete, N. and P. Lindner. (2013). *Household Vulnerability in Austria – A Microeconomic Analysis Based on the Household Finance and Consumption Survey*. In: OeNB. Financial Stability Report 25. 57–73.
- Arie Halachmi (2012) The Political Economy of Capital Budgeting, Public Performance & Management Review, 36:1, 138-157
- Armstrong, H.W. and J. Taylor. (2000). *Regional Economics and Policy*, Oxford: Blackwell
- Badan Pusat Statistik, (2017). DKI Jakarta *Dalam Angka / DKI Jakarta in Figures*
- Balasubramaniam, V. (2006), Embedding ethnic politics in Malaysia: Economic growth, its ramifications and political popularity. In: *Asian Journal of Political Science 14 (1)*, pp. 23-39.
- Conyers and Hills. (1990). *An introduction to Development Planning in the Third World*. Brisbane Toronto Singapore.
- Foremny, D., Freier, R., Moessinger, M.-D., Yeter, M., (2014). *Overlapping political budget cycles in the legislative and the executive*. DIW Discussion Paper 1429.
- Gomes, O., (2015). A budget setting problem. In: Bourguignon, J.P., Jelstch, R., Pinto, A.A., Viana, M. (Eds.), *Dynamics, Games and Science – International Conference and Advanced School Planet Earth, DGS II*. Springer International Publishing, pp. 285–294 (chapter 15)
- Goyal, Ashima 2010, "Budgetary Processes: A Political Economy Perspective", MPRA Paper No 27786, Munich.
- Greiner, A., (2011). Economic growth, public debt and welfare: comparing three budgetary rules. *German Economic Review 12*, 205–222.
- Hunter Blair (2016) 'The People's Budget': Analysis of the Congressional Progressive Caucus Budget for Fiscal Year 2017, *Challenge*, 59:4, 298-326,
- Holt, C.C. (1957) *Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages*. ONR Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania.
- Kuhlmann, S. (1998) Moderation of policy making? Science and technology policy evaluation beyond impact measurement—the case of Germany, *Evaluation*, 4(2), pp. 130–148.
- MyJoy Online, (2014). *Blame Political Leaders for Slums – Town & Planning Expert*. Ghanaweb Regional News, Tuesday 08, July.
- Lu, Y., & Willoughby, K. G. (2012). Performance budgeting in the states: An assessment. *IBM The Business of Government*, (Fall/Winter), 71–75.
- Miekatrien Sterck & Bram Scheers (2006) Trends in Performance Budgeting in Seven OECD countries, *Public Performance & Management Review*, 30:1, 47-72

LAMPIRAN :

Berdasarkan hasil analisis selama 25 tahun, penggunaan anggaran di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan instrumen PDRB tersebut mengindikasikan bahwa peran sektor ekonomi regional yang potensial dan dominan berdasarkan penciptaan output, nilai tambah maupun permintaan akhir berdampak pada penyerapan anggaran pembangunan bagi masyarakat di DKI Jakarta. Berdasarkan implementasi anggaran sebagai bagian dalam implementasi kebijakan, dapat diasumsikan bahwa implementasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan yang berfokus pada kekuatan dan keputusan politik.

Tabel 1: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 1992 - 1997

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
1992	1,130,731.3	16,001,557.0	7.1
1993	1,476,521.3	51,106,389.0	2.9
1994	1,847,936.7	55,505,268.0	3.3
1995	2,404,720.8	60,638,216.0	4.0
1996	2,835,833.8	66,164,802.0	4.3
1997	2,981,385.6	69,543,347.0	4.3

Tabel 2: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 1997 – 2002

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
1997	2,981,385.6	69,543,347.0	4.3
1998	1,802,068.9	57,380,517.0	3.1
1999	3,434,601.1	57,215,224.0	6.0
2000	3,127,364.2	59,694,418.0	5.2
2001	9,274,825.6	238,656,139.0	3.9
2002	8,754,245.8	250,331,157.0	3.5

Tabel 3: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 1997 – 2002

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
1997	2,981,385.6	69,543,347.0	4.3
1998	1,802,068.9	57,380,517.0	3.1
1999	3,434,601.1	57,215,224.0	6.0
2000	3,127,364.2	59,694,418.0	5.2
2001	9,274,825.6	238,656,139.0	3.9
2002	8,754,245.8	250,331,157.0	3.5

Tabel 4 : Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 1997 – 2002

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
1997	2,981,385.6	69,543,347.0	4.3
1998	1,802,068.9	57,380,517.0	3.1
1999	3,434,601.1	57,215,224.0	6.0
2000	3,127,364.2	59,694,418.0	5.2
2001	9,274,825.6	238,656,139.0	3.9
2002	8,754,245.8	250,331,157.0	3.5

Tabel 5: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 - 2007

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
2002	8,754,245.8	250,331,157.0	3.5
2003	10,382,597.1	263,624,242.0	3.9
2004	11,493,273.3	278,524,823.0	4.1
2005	12,435,352.4	295,270,545.0	4.2
2006	15,161,577.7	312,751,711.0	4.8
2007	17,280,823.4	332,971,255.0	5.2

Tabel 6: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 - 2007

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
2002	8,754,245.8	250,331,157.0	3.5
2003	10,382,597.1	263,624,242.0	3.9
2004	11,493,273.3	278,524,823.0	4.1
2005	12,435,352.4	295,270,545.0	4.2
2006	15,161,577.7	312,751,711.0	4.8
2007	17,280,823.4	332,971,255.0	5.2

Tabel 7: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
2007	17,280,823.4	332,971,255.0	5.2
2008	15,956,526.1	353,723,390.0	4.5
2009	19,511,099.4	371,469,500.0	5.3
2010	21,555,447.7	395,633,574.0	5.4
2011	26,423,682.2	422,121,511.0	6.3
2012	31,558,706.9	449,805,475.0	7.0

Tabel 8: Rasio APBD Terhadap PDRB Propinsi DKI Jakarta Tahun 2012 – 2016

Tahun	APBD (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Rasio (Persen)
2012	31,558,706.9	449,805,475.0	7.0
2013	38,294,384.9	477,285,245.0	8.0
2014	37,759,773.0	504,225,592.0	7.5
2015	43,031,322.9	523,925,770.0	8.2
2016	48,059,574.8	543,020,428.0	8.9